

ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PILAH SAMPAH DI KELURAHAN MANGKANG KULON, KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG

Ervin Dwi Ariyanto, Aufarul Marom
Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian berjudul ‘**Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang**’, didasari atas rasa ingin tahu peneliti terkait sampah yang belum terkelola dengan baik serta pengelolaan sampah yang belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan dampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran stakeholder pilah sampah serta faktor penghambat program. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian observasi, wawancara dan menggunakan dokumen online. Peneliti berusaha menggambarkan fenomena penelitian secara mendalam menggunakan data primer dan sekunder. Terdapat tujuh **stakeholder** program pilah sampah dan terdapat lima peranan stakeholder. Berdasarkan analisis **peran** diketahui bahwa pemerintah kota dan DLH berperan sebagai policy creator dan fasilitator, selain itu DLH juga berperan sebagai koordinator. Kecamatan dan kelurahan hanya sebagai koordinator. Bank sampah berperan sebagai koordinator dan implementor, KSM berperan sebagai akselator, koordinator dan implementor serta masyarakat sebagai implementor. Berdasarkan analisis pengaruh dan kepentingan ditemukan bahwa masyarakat menjadi subjek program, Bank sampah dan KSM sebagai aktor kunci, DLH kota Semarang sebagai pendukung dan pemerintah kota Semarang, kecamatan dan kelurahan sebagai pengikut. Artinya Bank sampah dan KSM adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan paling tinggi diikuti oleh DLH, masyarakat, kelurahan dan kecamatan serta pemerintah kota. Faktor penghambat program dianalisis menggunakan variabel komunikasi, nilai, tingkat kepercayaan dan sumberdaya. Ditemukan bahwa faktor penghambat adalah miss komunikasi, stakeholder terlalu ‘*money oriented*’, minim apresiasi, budaya membuang sampah sembarangan, partisipasi rendah, minimnya SDM dan sarana prasarana karena beberapa faktor penghambat tersebut berdampak pada pelaksanaan program pilah sampah menjadi belum maksimal. Diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar para serta pemerintah setempat bersama OPD terkait agar dapat mewujudkan program pilah sampah yang baik.

Kata kunci: *peran, stakeholder, pilah sampah*

ABSTRACT

The study entitled '**Analysis of the Role of Stakeholders in the Waste Sorting Program in Mangkang Kulon Village, Tugu District, Semarang City**', is based on the curiosity of researchers regarding waste that has not been properly managed and waste management that has not been maximized so that it has the potential to cause pollution and negative impacts on the community. . This study aims to analyze the role of waste sorting stakeholders and program inhibiting factors. Using a qualitative descriptive method with observational research techniques, interviews and using online documents. Researchers try to describe the phenomenon of research in depth using primary and secondary data. Based on the research results, there are seven **stakeholders** of the waste sorting program and there are five stakeholder roles. Based on the **role** analysis, it is known that the city government and the Environmental Agency (DLH) act as policy creators and facilitators, in addition to that DLH also plays a role as coordinators. Kecamatan and kelurahan are only coordinators. The waste bank acts as a coordinator and implementor, KSM acts as an accelerator, coordinator and implementor and the community as the implementor. Based on the analysis of influence and interest, it was found that the community was the subject of the program, the waste bank and KSM as the key actor, the DLH of the city of Semarang as a supporter and the government of the city of Semarang, sub-districts and villages as followers. This means that the waste bank and KSM are the stakeholders who have the highest influence and interest followed by DLH, the community, sub-districts and sub-districts as well as the city government. Program inhibiting factors were analyzed using communication variables, values, levels of trust and resources. It was found that the inhibiting factors were miscommunication, stakeholders were too 'money oriented', minimal appreciation, culture of littering, low participation, lack of human resources and infrastructure because some of these inhibiting factors caused the role of stakeholders to be less optimal so that it had an impact on the implementation of the waste sorting program. not maximal. Cooperation and good communication are needed between the local government and the relevant DPOs in order to realize a good waste sorting program.

Key words: *roles, stakeholders, sorting waste*

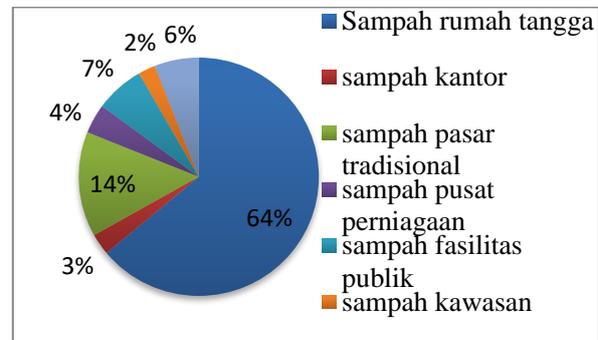
A. PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 di dunia yaitu sejumlah 268.074.600 jiwa (BPS, 2020), dengan total wilayah seluas 1,905,000 km² (BPS, 2020). Tentunya tidak akan mudah lepas dari permasalahan lingkungan seperti masalah degradasi lahan, deforestasi hutan, polusi (udara,air,tanah), limbah, sampah,. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara ini permasalahan sampah lah yang menjadi isu hangat yang banyak disoroti oleh masyarakat Indonesia. Jumlah populasi penduduk yang besar maka produksi sampah negara ini juga besar mencapai 65.200.000ton/tahun (Badan Pusat Statistik, 2018) dengan produksi sampah yang besar tentu dibutuhkan pengelolaan sampah yang mumpuni untuk dapat mengelola limbah buangan tersebut agar tidak menjadi pencemaran.

Badan Pusat Statistik (2018) memperkirakan jumlah populasi penduduk di Indonesia akan meningkat dari 23.713.544 jiwa menjadi total 284.829.000 jiwa pada tahun 2025 dengan penambahan penduduk sebesar 9,08% dari tahun 2016 ke 2025. Sejalan dengan peningkatan populasi penduduk tersebut maka, diperkirakan produksi sampah nasional meningkat sebesar 5.928.386 ton menjadi total 71.128.386 ton pada 2025 mendatang. Berdasarkan data tersebut hendaknya pemerintah dapat

melakukan langka antisipasi melalui kebijakan-kebijakan atau program terkait lingkungan dan pengelolaan sampah yang tepat.

Gambar 1 Sumber sampah nasional



sumber:<https://sipsn.menlhk.go.id>

Berdasarkan data tersebut sumber terbesar dari produksi sampah nasional adalah bersumber dari sampah rumah tangga yang menyumbang presentase sebesar 64% dari total keseluruhan sumber sampah di Indonesia kemudian disusul oleh sampah pasar tradisional dengan presentase 14% dan kemudian sampah fasilitas publik sebesar 7% dari data tersebut artinya jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan sangat besar keluarga sebagai penyumbang utama dan bahwa sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 41.728.000 ton per tahun pada tahun 2018 dan disusul oleh sampah yang bersumber dari pasar tradisional sebanyak 9.128.000 ton per tahun.

Pemerintah harus lebih fokus kepada pengelolaan sampah rumah tangga (SRT). Kegiatan pemilahan merupakan salah satu cara untuk menangani dan dapat mengurangi

permasalahan timbunan sampah akibat timbunan sampah yang selaras dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Perlu diketahui bahwa tindakan rumah tangga terhadap sampah yang dihasilkan sebanyak 66,8% adalah membakar sampah, mendaur ulang hanya 1,2% dan tindakan lainnya sebanyak 32% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018) tindakan pembakaran sampah berpotensi menimbulkan gas buangan yang dapat mencemari lingkungan, usaha daur ulang sangat kecil hanya 1,2% saja, seharusnya disini peran pemerintah untuk mendorong rumah tangga melakukan langkah daur ulang ataupun pengelolaan yang lain dengan cara yang tepat agar tidak mengakibatkan permasalahan lingkungan lainnya.

Pada tahun 2018 menurut data Badan Pusat Statistik(2018) setidaknya terdapat 594 kawasan pemukiman kumuh di Jawa Tengah. Pemukiman yang kumuh tercipta dari tingkat kepadatan penduduk, tingkat ekonomi, budaya hidup masyarakat, dan dipengaruhi oleh sistem pengelolaan sampahnya. Pada 2017 terdapat 924.962 jumlah kasus diare dan 7400 kasus DBD, penyakit-penyakit tersebut dapat disebabkan karena sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kotor dan sebagian dari kasus penyakit akibat dari masalah lingkungan berpusat di ibukota provinsi Jawa Tengah yaitu kota Semarang. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kota adalah dengan menerapkan

program pilah sampah di kota Semarang, dengan harapan bahwa dominasi sampah-sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat tidak semuanya kemudian di buang tidak termanfaatkan dan hanya akan menjadi sampah saja tetapi pemerintah berusaha mendorong masyarakat agar mau memilah sampah yang masih layak atau sampah barang-barang yang sekiranya masih memiliki nilai guna yang nantinya akan di daur ulang menjadi produk bernilai yang ramah lingkungan dan ekonomis.

Melalui program pilah sampah diharapkan sampah-sampah yang nantinya diangkut oleh truk sampah Dinas Kebersihan untuk dibawa ke TPA biasanya adalah barang buangan yang sudah tidak terdapat nilai guna-nya sehingga jumlah timbunan sampah di TPA nantinya akan menurun seiring dengan berjalanya program tersebut. Kelurahan di kota Semarang yang telah melaksanakan program Pilah Sampah adalah kelurahan Mangkang Kulon. Kelurahan seluas 399.819 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.682 jiwa dengan jumlah 6 RW dan 21 RT (Website Kecamatan Tugu, 2018). Sejak tahun 2018 kelurahan Mangkang Kulon ditunjuk oleh pemerintah kota Semarang sebagai Kampung Tematik Pilah Sampah. Program yang diresmikan pada tanggal 25 Juni 2018 dibarengi dengan pendirian Bank sampah. Bank sampah tersebut sebagai tempat untuk menampung sampah-sampah yang dikumpulkan

masyarakat dan nantinya akan di pilah sebelum di olah menjadi produk yang bernilai ekonomis atau sebagian dibuang.

Program tersebut diperlukan guna mengatasi permasalahan timbunan sampah yang tak terangkut dan sering menumpuk sehingga mengakibatkan timbulnya bau busuk karena sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga di Mangkang kulon adalah sampah organik serta permasalahan mengenai bencana banjir yang sering terjadi akibat permasalahan sampah di kelurahan mangkang kulon. Harapan pemerintah dari program pilah sampah adalah dapat mengurangi timbunan sampah, pembusukan yang menimbulkan bau tak sedap, mengurangi lingkungan kumuh dan dapat menjadi sumber pemasukan bernilai ekonomis dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana program.

Permasalahan sampah selain itu juga dapat berdampak pada timbulnya potensi bencana alam. Kelurahan Mangkang Kulon merupakan salah satu daerah yang seringkali dilanda oleh bencana banjir. Banjir yang sangat mengganggu aktifitas warga dan berdampak buruk pada gagal panen akibat banjir yang merendam area persawahan warga, merendam area tambak dan dapat merusak bangunan juga. Bencana banjir yang juga terjadi karena sampah. Banjir bukan hanya datang saat curah hujan tinggi melainkan juga akibat ulah manusia sendiri. Peristiwa banjir di kelurahan Mangkang

memang menjadi peristiwa yang sudah sering didengar oleh masyarakat kota semarang dan sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa apabila terjadi hujan wilayah ini sering dilanda oleh banjir. Persoalan sampah juga menjadi salah satu faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya banjir dan tentu saja ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di kelurahan Mnagkang kulon.

Persoalan sampah di kelurahan Mangkang kulon tentu menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah setempat saja dan pasti ada beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Mangkang kulon, bagaimana peran dari para pengelola sampah sehingga bencana banjir masih sering melanda wilayah ini dan perlu menjadi perhatian bahwa permasalahan yang terjadi tentu dapat dikatakan bahwa setiap *stakeholder* pasti memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing di dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon sehingga timbulah pertanyaan **“Mengapa peran *stakeholder* program pilah sampah belum maksimal ?”**

B. KAJIAN TEORI

Peran

Pembahasan mengenai suatu program atau kebijakan tidak akan pernah lepas dari konsep peran. Setiap individu atau kelompok yang terlibat pasti memiliki peran dapat dikatakan demikian karena bersumber dari

tindakan dan perilaku dari individu atau kelompok yang pasti memiliki suatu dampak di dalam suatu program atau kebijakan. Peran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *role* merupakan pola perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam strata sosial di masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat dapat melakukan sebuah perubahan positif bagi lingkungan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas – tugas yang dimilikinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Wulandari, 2013).

Stakeholders

Para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang penting demi kelangsungan sebuah organisasi atau lembaga. Para pemangku kepentingan biasanya disebut dengan istilah *stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari 2 kata yaitu kata *stake* dan *holder*. Secara garis besar istilah *stakeholder* memiliki makna sebagai seorang individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan tertentu dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi di dalam sebuah lingkungan internal maupun eksternal organisasi tersebut. *Stakeholder* biasanya memiliki hubungan keterkaitan dan kemampuan untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi baik dalam lingkup internal atau eksternal.

Menurut Maryono dalam (Nugroho, 2019) terdapat tiga jenis *stakeholder* yaitu,

- a. *Stakeholder primer* yaitu *stakeholder* yang menerima dampak langsung dari suatu rencana atau kegiatan tertentu, dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif dan negatif, *stakeholder* ini biasanya banyak terlibat di dalam proses awal hingga akhir sebuah kegiatan
- b. *Stakeholder kunci* yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau kegiatan karenanya merekalah yang biasanya bertanggung jawab atas kegiatan secara penuh
- c. *Stakeholder sekunder*, yaitu *stakeholder* pendukung biasanya mereka tidak terlibat secara langsung di dalam sebuah organisasi atau kegiatan tertentu karena mereka tidak memiliki kepentingan dan pengaruh secara langsung dalam program tetapi mereka memiliki peran dalam mendukung dan memberi saran / masukan terhadap sebuah program.

Berkaitan dengan klasifikasi selanjutnya apabila dianalisis menurut tingkat kepentingan dan pengaruh seorang tokoh bernama *Gardener et al.*, dalam (Nugroho, 2019) mengklasifikasikan beberapa *stakeholder* sebagai berikut,

- a. Subyek (*Subject*) merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi

- akan tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain kunci (*key player*) adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi serta memiliki pengaruh yang tinggi pula.
 - c. Pengikut (*Crowd*) adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang rendah serta kepentingan yang rendah juga.
 - d. Pendukung (*contest setter*) adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang rendah akan tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Menurut pendapat dari tokoh lainnya mengenai peran *stakeholder* salahsatunya adalah pendapat dari Nugroho(2014) dalam (Zuhri, Haryono, & Anggraeni, 2015) sebagai berikut,

- a. *Policy Creator* adalah *stakeholder* yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan penentu dalam kebijakan tertentu.
- b. Koordinator adalah *stakeholder* yang berperan untuk mengkoordinasikan program kepada pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.
- c. Fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan dalam memfasilitasi kepentingan pemangku kepentingan lainnya terhadap sebuah program secara fisik maupun non fisik.
- d. Implementor adalah *stakeholder* yang memiliki tugas sebagai bagian

- pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan kebijakan / keputusan yang telah ditentukan kepada kelompok sasaran.
- e. Akselelator adalah *stakeholder* yang berperan untuk mendukung pelaksanaan program agar dapat efektif dan efisien sehingga dapat tercapai sesuai dengan target serta tujuan yang telah diharapkan.

Analisis Stakeholders

Analisis *stakeholder* adalah sebuah proses memetakan posisi *stakeholder* terhadap kegiatan yang akan dijalankan atau dirancang oleh organisasi publik, melakukan analisis *stakeholder* sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui siapa-siapa saja atau pihak mana saja yang akan bekerja sama dalam mewujudkan sebuah tujuan kebijakan atau program. Berikut beberapa manfaat analisis *stakeholder* menurut Wisnubroto,

- 1) Meningkatkan keberhasilan program
- 2) Meminimalisir berbagai risiko yang akan dihadapi seperti, penolakan terhadap program atau perubahan
- 3) Menjembatani modal sosial yang dapat berperan positif
- 4) Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan perubahan
- 5) Memberikan sebuah gambaran yang jelas terkait sasaran, potensi dan tantangan program.

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis *stakeholder* adalah model

Diagram Venn yaitu diagram yang menunjukkan semua kemungkinan yang berhubungan dengan logika rasional dan hipotesis. Metode lain yang digunakan dalam analisis *stakeholder* diantara *stakeholders* individu atau kelompok menurut Grimble dan Wellard dalam (Aisyah, Yusuf, & Lawelle, 2017) adalah PI (Power dan Interest) yang membagi menjadi empat kategori diantaranya sebagai berikut,

- a. Kategori Power tinggi dan interest tinggi (dominan), yaitu pemangku kepentingan dengan power yang sangat kuat yaitu berpengaruh sebagai key player atau aktor kunci dalam sebuah program serta memiliki kepentingan yang dominan.
- b. Kategori Power tinggi dan interest rendah (contest setter), yaitu stakeholder dengan pengaruh yang tinggi namun memiliki kepentingan yang rendah, stakeholder ini biasanya menjadi pendukung program.
- c. Kategori interest tinggi dan power rendah, yaitu stakeholder dengan kepentingan tinggi dan pengaruh yang rendah.
- d. Kategori interest rendah dan power rendah yaitu pihak yang tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki pengaruh pada sebuah program sehingga hanya menjadi pengikut.

Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah setiap tindakan yang dilakukan mulai dari awal timbulnya sampah hingga sampai kepada

tahap pemrosesan dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir(TPA). Secara umum penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara a)pengurangan sampah dan b)penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pengurangan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan cara proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (PP RI NOMOR 81 TAHUN 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga, 2012).

Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang dari sumbernya, pengelola kawasan(pemukiman,komersial, kawasan industri dan fasilitas umum), dan pemerintah kabupaten/kota di setiap daerah. Proses pemilahan dilakukan dengan pengelompokan paling sedikit lima jenis sampah menurut (Peraturan Pemerintah RI No 81 Tahun 2012, 2018) pasal 16 dan 17 yaitu,

- a) sampah 3B yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya, beracun
- b) sampah yang mudah terurai
- c) sampah yang dapat digunakan kembali
- d) sampah yang dapat didaur ulang dan,
- e) sampah lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitiannya di kelurahan Mangkang kulon, kecamatan Tugu, kota Semarang, Jawa tengah dengan subjek penelitian yaitu pemerintah kota Semarang, Dinas lingkungan hidup(DLH) kota Semarang, kecamatan Tugu, kelurahan Mangkang kulon, Bank sampah karya melati, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan masyarakat. Jenis penelitian kualitatif menggunakan data primer dan sekunder melalui metode pengumpulan data observasi langsung, wawancara, dan dokumen.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Peran *Stakeholders* Program Pilah Sampah di Kelurahan Mangkang Kulon

Stakeholder Primer

a) Masyarakat Kelurahan Mangkang kulon

Berperan sebagai **Implementor** . Masyarakat kelurahan Mangkang kulon sebagai subjek dari program pilah sampah memiliki peran sebagai implementor. Masyarakat berperan sebagai pelaksana program artinya masyarakat adalah pihak yang bertanggung jawab untuk ikut melaksanakan kegiatan pilah sampah di wilayahnya masing-masing bersama dengan KSM masing-masing Rw dari mulai kegiatan

pemilahan mandiri yang dilakukan oleh setiap KK dirumah masing-masing, kemudian pengangkutan sampah menuju Bank sampah, penimbangan sampah, penyortiran, pengiriman sampah ke pengepul atau produksi kerajinan tangan dari sampah (khusus sampah yang masih dapat digunakan).

Semua rangkaian kegiatan tersebut membutuhkan bantuan dan peran aktif dari masyarakat, namun ternyata tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masalah tersebut dan cenderung acuh. Hanya sebagian saja masyarakat memiliki kesadaran yang mau turut terlibat dalam kegiatan pilah sampah. Sebagai contoh di Rw 03 ada 145 KK yang tinggal dan yang terlibat dalam program ini hanya 20-30 KK saja dan paling banyak pernah diikuti oleh 50 KK. Jika dihitung persentasenya hanya 34% saja keluarga yang mau turut berpartisipasi. Diperlukan peran serta dan dukungan dari banyak pihak untuk dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif.

Stakeholder Kunci

b) Bank Sampah Karya Melati

Berperan sebagai stakeholder kunci (*key player*) **Koordinator, Implementor** dalam program pilah sampah kelurahan Mangkang kulon. Bank sampah karya melati merupakan

induk dari KSM. Tanggung jawab Bank sampah adalah menjadi organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan pilah sampah di wilayah Mangkang kulon melalui KSM yang tersebar di setiap Rw, implementasi program pilah sampah di kelurahan bersama dengan setiap Rw agar tetap rutin terlaksana setiap bulan. Kegiatan terkait peran Bank sampah sebagai berikut,

1. Merencanakan dan mengelola program pilah sampah.
2. Mengkoordinir seluruh kegiatan terkait pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait program pilah sampah di Mangkang kulon, seperti mengolektif pengumpulan sampah yang telah dipilah dari setiap KSM kemudian menyetorkan sampah terpilah ke pengepul: DLH Kota Semarang, Pengepul minyak jelantah dan pengepul utama dari kecamatan Boja, kabupaten Kendal.

c) **Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM**

Berperan sebagai **Akselator, Koordinator, Implementor** Kelompok swadaya masyarakat atau disingkat KSM merupakan organisasi swadaya masyarakat yang terbentuk dengan tujuan mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat sekitar. Kelompok ini pada mulanya merupakan inisiatif dari warga masyarakat Mangkang kulon yang tergerak karena melihat pengelolaan sampah terpadu di

kecamatan Banyumanik, Semarang yang berjalan sukses dan memberi banyak manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Ibu – ibu pada saat itu menjadi termotivasi karena percontohan antara kecamatan Ngaliyan dengan kelurahan Mangkang kulon yang memiliki permasalahan yang serupa yaitu terkait sampah namun kecamatan Banyumanik memiliki pengelolaan yang sudah maju berbeda dengan Mangkang kulon yang pada saat itu belum memiliki kegiatan pengelolaan sampah padahal potensi bencana di wilayah tersebut akibat sampah cukup besar.

Pada 22 April 2015 akhirnya dimulailah kegiatan pengelolaan sampah untuk pertama kalinya dengan 4 orang ibu-ibu yang berkeliling ke rumah-rumah untuk mengangkut sampah dari masyarakat di Rw 03 secara manual menggunakan songkro yang dilakukan setiap tanggal 5 setiap bulan setelah kegiatan penimbangan balita di posyandu. Pada awalnya kegiatan yang dimulai oleh bu Nur indarti, Unwah, Rochimah dan Sriyatun tersebut dianggap kurang kerjaan dan dianggap sebelah mata oleh masyarakat.

Perlu waktu 3 tahun hingga akhirnya KSM mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan kelurahan sebagai kelompok yang benar-benar peduli pada permasalahan lingkungan dan berkontribusi aktif di kelurahan Mangkang kulon hingga akhirnya dibentuknya organisasi formal dibawah

kelurahan yang bertugas mengelola sampah yaitu Bank sampah karya melati yang masih aktif hingga saat penelitian ini berlangsung. KSM merupakan kelompok dibawah Bank sampah yang memiliki peran untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat Mangkang kulon.

Berikut ini kegiatan terkait peran KSM,

1. Membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan sosial termasuk program pilah sampah agar berjalan secara efektif dan efisien dengan cara berusaha meningkatkan partisipasi secara persuasif demi kepentingan masyarakat umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemilahan dan pengumpulan melalui media online grup whatsapp, forum PKK, dan pengumuman melalui sound masjid di lingkungan sekitar.
3. Mengkolektif sampah dari masyarakat di setiap Rt/Rw, dengan cara setiap KK menyeter secara mandiri sampah terpilah ke rumah pengurus KSM atau pengurus KSM yang harus keliling menghampiri setiap rumah untuk mengambil sampah dengan songkrow, gerobak maupun tossa apabila KK tersebut tidak menyeter sampah secara mandiri.
4. Melakukan penimbangan sampah dan kemudian memilah sampah yang masih bercampur dan mengelompokkan sampah menjadi 2 jenis yaitu, sampah organik dan sampah anorganik (berupa sampah

kertas, kardus, botol, besi, kaca, plastik,) kemudian sampah tersebut dipisahkan sesuai warna.

Stakeholders Sekunder

d) Pemkot Semarang

Berperan sebagai *Policy Creator* dan **Fasilitator**. Pemerintah kota membuat sebuah kebijakan terkait pengelolaan sampah di kota Semarang yang bertujuan mengatur dan menjadi pedoman pengelolaan sampah yang baik yang mana memiliki legalitas hukum yang memaksa pihak-pihak terkait agar patuh dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Berdasarkan Perda Kota Semarang No.6 Tahun 2012 pasal 30 dan 31 ayat 1), Pemerintah daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana kerja dalam hal ini sesuai dengan Misi ke-3 kota Semarang yaitu mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan. Sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan sampah di lingkup kecamatan maupun kelurahan akan tetapi pemerintah kurang dalam hal tersebut. Pada program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon pemerintah kota dirasa kurang memperhatikan dan mendukung fasilitas pilah sampah sehingga masyarakat menggunakan fasilitas seadanya yang tentunya hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal.

e) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Berperan sebagai *Policy creator*, **Koordinator, Fasilitator**. Berdasarkan hasil penelitian DLH berperan merumuskan kebijakan dan rencana strategis bidang lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan di kota Semarang sesuai dengan visi misi walikota, mengkoordinasi program melalui sosialisasi dan pelatihan atau workshop dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan sampah, monitoring evaluasi kegiatan bidang pengelolaan sampah, memfasilitasi pelaksanaan program.

Peran Dinas lingkungan hidup dalam mendukung dan mendorong kegiatan pengelolaan sampah dalam hal ini dilaksanakan dengan cukup baik dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah bekerjasama dengan kelurahan serta melaksanakan kegiatan pelatihan / workshop pembuatan produk kreatif bernilai jual dari sampah. Masyarakat pada awalnya cukup antusias namun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan workshop hanya dilakukan beberapa kali saja diawal dan kurang adanya monitoring dari pihak Dinas untuk melakukan pemantauan keberjalanan program. Namun demikian DLH tetap berusaha untuk mendukung dan memfasilitasi program pilah sampah dengan

cara menjadi pengepul sampah hasil pilah dari Bank Sampah Karya melati.

f) Kecamatan Tugu

Sebagai **Koordinator** kecamatan berperan mengkoordinasi lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan, mengawasi pelaksanaan tertib pengelolaan sampah mulai dari lingkup rukun warga dan kelurahan, mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola sampah. Kecamatan dirasa masing kurang melaksanakan perannya dengan maksimal karena menurut pengurus Bank sampah dan KSM Melati kecamatan hanya melaksanakan koordinasi ke pengelola sampah di kelurahan yaitu Bank sampah hanya untuk formalitas saja namun tidak benar-benar peduli ataupun ingin turut berpartisipasi didalam kegiatan terbukti selama pelaksanaan kegiatan pihak kecamatan jarang hadir untuk melakukan pengawasan juga tidak. Serta peran untuk mengusulkan fasilitas pendukung pengelolaan sampah juga masih kurang.

g) Kelurahan Mangkang Kulon

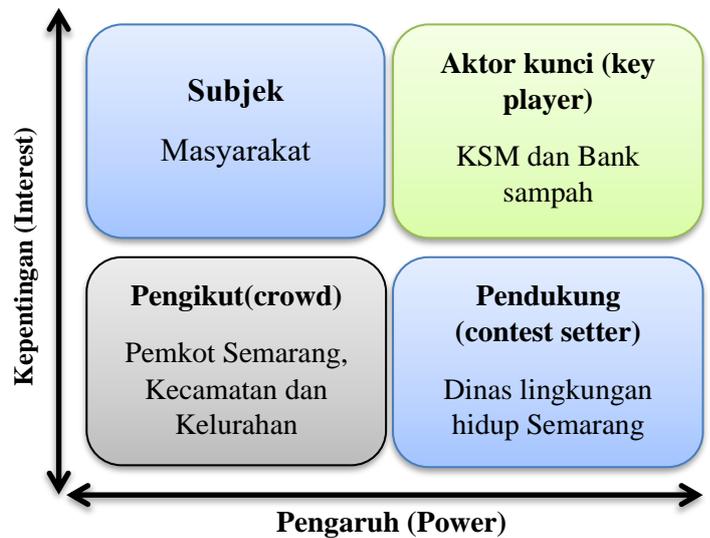
Sebagai **Koordinator** program. Berperan mengkoordinasi program pilah sampah bersama dengan Bank sampah di kelurahan Mangkang kulon, mengawasi pelaksanaan program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon, mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola sampah sama halnya seperti kecamatan, kelurahan juga kurang bisa

memaksimalkan peran yang dimilikinya, meskipun kelurahan memiliki peran koordinator namun kelurahan sebagai pemerintah desa kurang aktif dan cepat melakukan koordinasi kepada Bank sampah, KSM, dan masyarakat. informasi sering tersendat dan terkadang disampaikan secara mendadak (seperti pada 2019 ada kunjungan tim penilai bank sampah dari provinsi namun karena informasi tidak disampaikan kepada pengelola Bank sampah akhirnya mangkang kulon mendapat penilaian yang kurang baik). Peran pengawasan dan membantu mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pilah sampah juga minim dan kurang signifikan.

Tabel 1 Rangkuman peran *stakeholders* program pilah sampah

	Policy Creator	Koordinator	Fasilitator	Implementor	Akselator
Pemerintah Kota Semarang	V	-	V	-	-
DLH Kota Semarang	V	V	V	-	-
Kecamatan Tugu	-	V	-	-	-
Kelurahan Mangkang Kulon	-	V	-	-	-
Bank Sampah	-	V	-	V	-
KSM	-	V	-	V	V
Masyarakat	-	-	-	V	-

Gambar 2 Matriks Mendelow Stakeholder Program Pilah Sampah



Peneliti melalui gambar matrix diatas berusaha untuk mengklasifikasikan stakeholder program pilah sampah menjadi 4 kategori yang pertama aktor kunci (*key player*) terdiri dari KSM dan Bank sampah. Aktor kunci (*key player*) memiliki tingkat kepentingan/interest yang tinggi dan pengaruh/power yang tinggi pula. Mereka sangat berperan dalam program tersebut karena Bank sampah merupakan induk pelaksanaan program pilah sampah di kelurahan Mnagkang kulon bank sampah karya melati memiliki kepentingan yang kuat untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah sekitar sama halnya dengan KSM / kelompok swadaya masyarakat juga berperan secara aktif dan menjadi pionir pilah sampah.

Ketua Rt/Rw juga termasuk bagian dari bank sampah yang memiliki power yang sangat besar dalam pelaksanaan program tersebut. Mereka memiliki pengaruh melalui

kedudukan yang dimilikinya sebagai pemimpin wilayah rukun warga dan rukun tetangga, seringkali pelaksanaan kegiatan-kegiatan pilah sampah membutuhkan bantuan dari ketua Rt/Rw untuk dapat menarik partisipasi aktif dari masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon.

Kategori selanjutnya adalah pendukung (*contest setter*) yang terdiri dari Dinas lingkungan hidup. Stakeholder ini memiliki pengaruh yang besar pada program tersebut tetapi memiliki kepentingan yang rendah. Dinas lingkungan hidup berperan sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan program dengan cara bantuan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan workshop keterampilan membuat kerajinan tangan melalui sampah, selain itu DLH juga menjadi salah satu pengepul sampah hasil pemilahan Bank sampah karya melati.

Kategori yang ketiga adalah subjek (*subject*) yaitu masyarakat kelurahan Mangkang kulon. Masyarakat dapat dikategorikan menjadi subjek program karena mereka memiliki kepentingan yang tinggi terhadap program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon. Sebagian masyarakat merasa program ini merupakan sebuah solusi atas permasalahan sampah yang masih menjadi sebuah ancaman karena

pengelolaan sampah yang buruk musibah banjir seringkali melanda kelurahan Mangkang kulon, tentu musibah banjir sangat mengganggu aktivitas dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena berpotensi menimbulkan wabah penyakit akibat lingkungan yang kumuh.

Masyarakat menjadi subjek yang penting untuk bekerjasama mendukung pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan dengan maksimal, namun demikian terdapat tantangan untuk menarik partisipasi aktif dan peran serta masyarakat karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian akan kepentingan yang sama dalam usaha pengelolaan sampah sehingga sebagian yang lain hanya menjadi pengikut program (tidak memiliki *interest* dan *power*). Kategori yang keempat adalah pengikut (*crowd*). Pengikut dalam program ini adalah kecamatan dan kelurahan.

Pemerintah kota Semarang, kecamatan Tugu dan kelurahan Mangkang kulon dalam hal ini menjadi stakeholder yang tidak memiliki kepentingan dan pengaruh dalam program tersebut hal ini terjadi karena mereka tidak benar-benar ikut terlibat secara langsung dalam program ini. Kelurahan dan kecamatan sebagai pemerintah lokal disini hanya berperan untuk melakukan monitoring, pengawasan dan penasehat saja. Tidak ada partisipasi nyata dan tingkat kepedulian rendah dalam berbagai kegiatan dan kebutuhan program pilah sampah.

2. Faktor Penghambat Program Pilah Sampah di Kelurahan Mangkang Kulon

a) Miskomunikasi

Intensitas komunikasi yang kurang menjadi salah satu penyebab terjadinya miskomunikasi yang menjadi faktor penghambat program hal ini terjadi karena pemerintah setempat kurang aktif dalam melakukan komunikasi dan arahan kepada masyarakat khususnya Bank sampah dan KSM yang menjadi implementor program serta kelurahan dan kecamatan yang seharusnya berperan sebagai koordinator dalam program ini dinilai masih kurang mengkomunikasikan kepada Pemerintah kota maupun Dinas Lingkungan Hidup terkait kebutuhan-kebutuhan sarana penunjang yang dibutuhkan Bank sampah dan KSM dalam rangka menunjang kegiatan program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon.

Faktor lainnya yang menghambat akibat kurangnya komunikasi adalah sering terjadinya kesalahpahaman antara kecamatan Tugu dan kelurahan Mangkang kulon terkait peran sebagai fasilitator kelurahan menganggap bahwa seharusnya yang membantu menyediakan sarana prasarana adalah kecamatan dan sebaliknya kecamatan menganggap kelurahan yang seharusnya memfasilitasi program selain karena kurangnya komunikasi hal itu terjadi karena belum ada SOP operasional Bank sampah di kelurahan secara jelas.

b) Budaya Membuang Sampah Sembarangan

Program ini telah berjalan kurang lebih selama 6 tahun namun demikian masih cukup sulit untuk dapat mengubah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Sebagian masyarakat sudah menyadari akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya namun masih ada saja sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai, selokan, ke kebun dan/atau dengan cara dibakar.

Sebenarnya kebiasaan ini terjadi sudah sangat lama sebelum ada program pilah sampah dan sudah menjadi budaya yang mengakar di dalam diri masyarakat karena dulu memang di kelurahan Mangkang kulon belum ada fasilitas pembuangan sampah sementara sehingga masyarakat kesulitan membuang sampah serta membuang sampah ke sungai, selokan atau kebun juga simpel dan praktis.

Pada saat ini fasilitas pembuangan sampah sementara memang sudah ada tetapi masyarakat yang harus membayar iuran sejumlah 15-30 ribu per bulannya sebagian yang enggan untuk membayar akhirnya tetap membuang sampah sembarangan dan truk pengangkut sampah juga hanya datang mengangkut sampah 1x setiap minggu atau sebulan 4x sehingga terkadang masyarakat membuang sampah ke sungai dengan pemikiran bahwa sampah akan cepat hanyut dan praktis.

c) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan analisis peran stakeholder masyarakat berperan sebagai implementor program pilah sampah yang artinya masyarakat adalah subjek pelaksanaan kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh stakeholder lainnya dalam hal ini masyarakat berperan dalam program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon. Namun ternyata partisipasi masyarakat dirasa masih kurang.

Hal tersebut dapat dilihat dari contoh terdapat 145 kepala keluarga dan yang tinggal di Rw 03 namun yang turut berpartisipasi hanyalah 20-30 KK saja atau hanya sekitar 34%. Jumlah tersebut tentunya terbilang masih sangat sedikit. Sebagian dari masyarakat enggan untuk terlibat karena para pemimpin lingkup terkecil seperti ketua Rt dan ketua Rw kurang mengayomi mereka untuk ikut bergerak bersama, masyarakat Mangkang kulon sebetulnya lebih patuh dengan ketua Rt/Rw dibandingkan dengan pengurus Bank sampah maupun KSM serta hal ini diperparah karena pemerintah setempat yaitu kelurahan kurang aktif mengkoordinir dan berkomunikasi ke Rt/Rw sehingga mereka cenderung apatis terhadap program.

d) Minim Apresiasi

Pemerintah daerah setempat yaitu kelurahan kurang mengapresiasi hasil kerja keras Bank sampah, KSM, dan masyarakat

yang selama 6 tahun sudah bekerja sosial demi mewujudkan lingkungan Mangkang kulon yang bersih dan sehat karena hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat dan pengurus Program pilah sampah menjadi kurang semangat dan malas terlibat. Jangankan memberi bantuan sarana pra sarana program bahkan hanya untuk mengapresiasi saja tidak dilakukan, kelurahan dan kecamatan terlalu pasif dan terkesan cuek pada program ini, ya meskipun fokus visi dan misi kelurahan Mangkang kulon lebih kepada bidang pertanian namun seharusnya kelurahan bisa tetap menghargai usaha masyarakat minimal dengan sebuah dukungan saja.

e) Terbatasnya SDM

Bank Sampah Karya Melati dan KSM yang memiliki pengurus terbatas, selain itu jumlah SDM selama pandemi juga berkurang drastis dan sekarang hanya didominasi pengurus saja, pengurus sudah mencoba untuk mengajak dan menarik partisipasi aktif dari masyarakat namun hasilnya masih cukup jauh dari harapan. Program pilah sampah dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah: pengangkutan, penimbangan, dan pemilahan kepada 1.573 KK yang tersebar di 21 Rt dan 6 Rw di Kelurahan Mangkang kulon sedangkan pengurus inti Bank sampah hanya berjumlah 21 orang saja, ditambah 17 orang

koordinator setiap Rw. Mengingat produksi sampah terpilah setiap bulan bisa mencapai 2 ton serta perbandingan antara jumlah kepala keluarga yang ada dengan pengurus Bank sampah tentu sangat tidak sebanding. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan program mejadi kurang efektif.

f) Terbatasnya Sarana

Fasilitas pilah sampah jika ditinjau dari segi kuantitas masih minim karena hanya terdapat 2 tossa dan 3 gerobak yang dimiliki Bank sampah sebagai kendaraan pengangkut sampah dari masyarakat dan bahkan pengurus KSM di masing-masing Rw biasanya memakai Songkro sebagai alat membawa sampah secara manual namun dalam jumlah yang kecil untuk mengangkut sampah dari rumah masyarakat untuk kemudian dikolektif. Alat lainya yang diperlukan yaitu timbangan untuk menimbang sampah, hanya ada beberapa timbangan gantung dan juga TPS berupa tong sampah untuk memilah sampah organik dan anorganik serta alat-alat kebersihan lainya juga masih minim karena itu berpengaruh pada kegiatan pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon. Bank sampah dan KSM sudah sering mengajukan permohonan bantuan sarana kepada kelurahan, kecamatan dan bahkan DLH kota Semarang namun kurang mendapatkan perhatian.

E. KESIMPULAN

a) Analisis Peran Stakeholder

Menggunakan metode wawancara dan observasi akhirnya diketahui bahwa masyarakat berperan sebagai implementor(subjek program), Bank sampah Karya melati dan KSM sebagai koordinator, implementor, dan akselelator. Pemerintah kota Semarang sebagai *policy creator* dan fasilitator, Dinas lingkungan hidup kota Semarang sebagai *policy creator*, koordinator dan fasilitator, kecamatan Tugu berperan menjadi koordinator dan fasilitator, dan yang terkahir kelurahan Mangkang kulon berperan sebagai koordinator dan fasilitator.

b) Faktor yang menghambat

Hambatan program tersebut seperti kurangnya komunikasi, budaya *money oriented*, budaya membuang sampah sembarangan, kurangnya partisipasi masyarakat, minimnya apresiasi, terbatasnya sumberdaya dan sarana prasarana yang terbatas. Faktor- faktor tersebutlah yang menghambat Program pilah sampah sehingga masih sering dijumpai tumpukkan sampah di wilayah tersebut yang menyumbat saluran air sehingga sering menyebabkan banjir dan dapat disimpulkan bahwa program pilah sampah di kelurahan Mangkang kulon masih belum maksimal.

F. SARAN DAN REKOMENDASI

- a) **Saran untuk stakeholder program pilah sampah** di kelurahan Mangkang kulon agar dapat membangun komunikasi yang intensif dan keterbukaan antara stakholder internal dan eksternal. DLH bersama kecamatan dan kelurahan melakukan pendampingan secara rutin dan intensif kepada Bank sampah, KSM dan masyarakat. Bank sampah sebaiknya membangun kemitraan dengan swasta untuk pemasaran produk dan bantuan sarana pilah sampah, pengadaan pameran produk sampah agar lebih dikenal dan membuat SOP operasional pilah sampah.
- b) **Saran bagi pemerintah** setempat yaitu kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota agar lebih peduli terhadap program pilah sampah dan memfasilitasi serta mendukung secara finansial pelaksanaannya dan mengayomi masyarakat agar turut berpartisipasi serta melaksanakan program secara rutin setiap minggu.
- c) **Saran bagi masyarakat** agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar khususnya persoalan sampah. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
- d) **Rekomendasi bagi akademisi** diharapkan pembaca atau peneliti dapat lebih cermat dan teliti dalam melakukan

analisis peran dan semoga hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan mengenai analisis peran stakholder lingkungan khususnya program pengelolaan sampah yaitu pilah sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- PP RI NOMOR 81 TAHUN 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga.* (2012). Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- DPU Kota Semarang. (2018). *Banjir kota Semarang*. Dipetik Maret 31, 2021, dari https://dpu.semarangkota.go.id/Main_Content/Get_Content/4
- Dunn, W. N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- KLHK. (2020). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Dipetik Maret 31, 2021, dari <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Nugroho, Y. A. (2019). ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT DI BALAI DIKLAT APARATUR KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. *Manajemen dan Bisnis Kreatif*, 5 , 6-8.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2017, Mei 22). *Pengertian Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. Dipetik Mei 15, 2020, dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali: <https://bulelengkab.go.id>
- Peraturan daerah kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.* (t.thn.).
- Peraturan Pemerintah RI No 81 Tahun 2012. (2018, November 1). *Informasi regulasi pengelolaan sampah*. Dipetik Mei 11, 2020, dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): <http://sipsn.menlhk.go.id>
- Saftri, Pramudya Ajeng; Purba, Winda Sartika; Zulkifli, Mochamad;. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Wahab, S. A. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN*. Jakarta: BUMI AKSARA.
- Widowati, H. (2019, November 1). *Komposisi Jenis Sampah di Indonesia*. Dipetik Mei 11, 2020, dari Katadata: <http://databoks.katadata.co.id>
- Zuhri, M. A., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. (2015). PERAN DAN KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN NGLENGOK KABUPATEN BLITAR. *Jurnal Administrasi Publik(JAP)*, 3 No.12, 2070-2075.